



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN GIZI NASIONAL  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT UTAMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JIMMY ALEXANDER ADIRMAN**
2. Jabatan : **INSPEKTUR UTAMA**
3. NHK : **1024668**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.700.700.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 569.307.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 715.551.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 438.732.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.977.110.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>442.239.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA HILUX 2.4 DOUBLE CABIN 4X4 AITIGUN 125R Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 283.506.000		
2. MOBIL, SUZUKI BALENO IK1FS (4X2) M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. MOTOR, HONDA NC11D1CF A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.733.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.581.351.974</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.724.290.974</b>



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.724.290.974

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.